

**PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM PERENCANAAN
ANGGARAN PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA SIDOARJO**

Nova Asteria Hastuti
Universitas Negeri Surabaya
Novaasteria@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study examined influence to know the role of accounting public sector in the financial planning budget at Sidoarjo. Where the role of accounting public sector which the most major is as a planning tool. While government financial accounting describing about financial condition of an organization that include on revenues state and expenditures. The result of the study indicated that's financial planning budget at Sidoarjo effective.

Keywords: Accounting Public Sector, Government Financial Accounting.

PENDAHULUAN

Perkembangan Akuntansi Sektor publik yang semakin pesat, hal ini disebabkan karena adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Melalui Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" terbentuklah UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU NO.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini kemudian mengalami revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Melalui Undang-undang ini pemerintah menerapkan sistem desentralisasi sebagai pengganti sentralisasi otoritas yang dianggap tidak lagi relevan dalam menciptakan stabilitas nasional. Perubahan paradigma tersebut membawa konsekuensinya adanya perubahan penyelenggaraan pemerintah di

berbagai aspek terutama dalam aspek keuangan. Dengan adanya perubahan peraturan ini diharapkan keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dengan harapan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebab indikator keberhasilan otonomi daerah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah.

Pemerintah Daerah yang secara Undang-undang telah dikembangkan akan lebih mampu mandiri, sehingga sebagian dari kewenangan pemerintah pusat telah didelegasikan kepada daerah, dan sebagian lainnya tidak bisa didelegasikan. Di antaranya sebagian yang sudah didelegasikan di bidang keuangan adalah telah diatur antara pajak daerah dan pajak pusat, di samping juga dana perimbangan, pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada daerah dengan rambu-rambu aturan dari pemerintah pusat. Selain bidang keuangan banyak juga bidang lainnya utamanya bidang pemerintahan yang didelegasikan kepada daerah, yang lebih dikenal dengan pemerintahan daerah, menyangkut keseluruhan aspek pembangunan, dan kegiatan sedangkan yang tidak didelegasikan ke daerah adalah: Bidang Hamkan dan Keamanan, Kepolisian, Hukum, Agama, dan Pendidikan Tinggi (Universitas) dan lain-lain yang masih dikendalikan pemerintah pusat.

Anggaran memiliki beberapa fungsi dalam akuntansi sektor publik, namun fungsi anggaran yang paling utama adalah sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan memberikan target yang harus

dicapai pemerintah dalam satu periode. Sedangkan sebagai alat pengendalian memberikan batasan-batasan tertentu dalam melakukan belanja daerah. Anggaran juga dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat memberikan keleluasan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu: menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Aspek perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervariasi strategik dan mampu berfikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah. Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik (*public money*) telah dilakukan sebagaimana mestinya (*sesuai konsep value for money*), perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah.

Selanjutnya tentang penelitian untuk memilih studi kasus Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah dengan harapan agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu melaksanakan perencanaan anggaran keuangan daerah dengan baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran akuntansi sektor publik dalam

perencanaan anggaran kinerja keuangan daerah kota Sidoarjo, khususnya pendapatan daerah kota Sidoarjo tahun anggaran 2012. Pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan oleh dinas-dinas penghasil pendapatan dan sebagai koordinator pendapatan adalah dinas pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai komitmen untuk mengembangkan kompetensi pegawai. Upaya mengembangkan kompetensi pegawai dilakukan dengan memberikan pelatihan baik di dalam maupun di luar kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008, dan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah . Sebab keberhasilan suatu Daerah dapat diukur dari terealiasinya anggaran kinerja keuangan daerah.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang diangkat berdasarkan hal tersebut adalah “Sejauh mana Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Perencanaan Anggaran Kinerja Keuangan Daerah Kota Sidoarjo”.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan akuntansi sektor publik dalam perencanaan anggaran kinerja keuangan daerah kota Sidoarjo.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Haryanto *et. al* 2006) Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi yang digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik mempunyai tujuan yang berbeda. Dari prespektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan prespektif ilmu ekonomi tersebut. Tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.

Menurut Mardiasmo (2002). Akuntansi sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensinya dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik

Pengertian-pengertian di atas dapat kita simpulkan Akuntansi Sektor Publik merupakan sebuah entitas yang segala aktivitasnya berhubungan dengan domain publik untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik. Dalam hal ini akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta berbeda namun fungsi sektor publik sebenarnya juga bias dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas

untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya.

Peran Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa peran akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk: (1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi; (2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu Penyediaan informasi, Pengendalian Manajemen, dan Akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (*cost of services*) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga

yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (*charging for services*). Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran. Pada sektor publik, penganggaran merupakan tahap yang membutuhkan keahlian khusus karena penganggaran pada sektor publik merupakan proses politik, sehingga manajer publik dituntut untuk memiliki *Political skill* disamping pemahaman teknik akuntansi.

Melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator kinerja sektor publik.

Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintahan, laporan rugi/laba dan aliran kas pada BUMN/ BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik hendaknya dipahami bukan sekedar akuntabilitas finansial saja, akan tetapi juga akuntabilitas *value for money*, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas publik.

Perencanaan Anggaran

Abe, Alexander (2005) menjelaskan perencanaan adalah susunan (*rumusan*) sistematis mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan dengan pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi-potensi, faktor-faktor internal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan tertentu.

Nawawi (2003) mengemukakan sebagai berikut “perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan”. Pengertian ini menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu dari beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi/perusahaan. Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut.

Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2002). Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Berdasarkan definisi-definisi di atas Perencanaan Anggaran merupakan bagaimana cara mengalokasikan dana yang baik dan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan, sehingga mampu menggambarkan kondisi keuangan

dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Keuangan Daerah

Pasal 1 Undang-undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut pada bagian penjelesan atas undang-undang tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dari sisi subyek meliputi seluruh obyek yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban, sedangkan dari sisi tujuan, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penugasan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Bertolak dari pengertian keuangan negara tersebut, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana negara dapat dianalogikan dengan daerah. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Ichksan *et.al* 1997).

Menurut Fatchurrochman (2002) menyebutkan batasan keuangan negara yang lebih luas, yaitu segala harta milik kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena kekayaan itu yang dikelola oleh pejabat negara, lembaga pemerintahan umum, yang dikuasai atau diurus oleh bank pemerintah, yayasan pemerintah dengan status hukum publik atau perdata, perusahaan negara dan usaha dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus, seperti kontrak manajemen, perjanjian dengan penyertaan pemerintah atau penunjukan pemerintah. Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan kewenangan dan kemampuan yang memadai dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.

UU No.33 Th. 2004 tentang sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pasal 5 ayat (1) terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari: a) Pendapatan Asli Daerah

(PAD), b) Dana perimbangan, c) lain-lain pendapatan, sedangkan pembiayaan bersumber dari: a) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah. b) Penerimaan pinjaman daerah, c) Dana cadangan daerah, d) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kinerja Keuangan Daerah

John Witmore dalam *Coaching for Performance* (1997) menyatakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum ketrampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja lembaga.

Kinerja dan kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2004). Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga aspek tersebut meliputi (Simanjutak dalam Halim, 2001): (1) Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber

pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut; (2) Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya tersebut meningkat; (3) Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Hasil analisis pendapatan dan pengeluaran merupakan komponen dalam menganalisis keuangan daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, akan terjadi surplus anggaran dan jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan akan terjadi defisit anggaran. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada pada tahun sekarang dan kecenderungan pada tahun-tahun mendatang, sehingga pola surplus dan defisit anggaran dapat diprediksikan.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Dilihat dari sisi pengeluaran, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu membelanjakan pendapatan yang diterima untuk selanjutnya memberikan timbal balik atas pengeluaran tersebut. Timbal balik dalam hal ini seperti pendapatan pajak dan retribusi. Analisis sisi pendapatan menggunakan pendapatan asli daerah sebagai titik sentral analisisnya, sedangkan analisis sisi pengeluaran menekankan pada belanja daerah sebagai titik sentral analisisnya. Diharapkan perbaikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar.

PEMBAHASAN

Peran Akuntansi Sektor

Pertama, Peran Akuntansi sektor publik dapat memberikan informasi yang memungkinkan pada pelaksanaan tanggung jawab program yang dilakukan domain publik dalam mengelola Anggaran keuangan Daerah secara tepat dan efektif dalam menjalankan wewenangnya. Bagi pemerintah Sidoarjo informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan startegik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Hal ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Kedua, peran akuntansi sektor publik adalah sebagai alat perencanaan. Di sini pemerintahan Sidoarjo dalam penerapan kinerja keuangan Daerah sesuai dengan perencanaannya sehingga anggaran yang diterapkan dapat terealisasi.

Ketiga, Peran Akuntansi sebagai pengendalian di sini akuntansi digunakan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintahan. Dengan harapan penerapan peran akuntansi yang ketiga ini pemerintah Sidoarjo dapat melaksanakannya dengan baik sehingga surplus dan defisit anggaran dapat diperhatikan.

Perencanaan Anggaran Kinerja Keuangan Daerah Kota Sidoarjo (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggran 2012

**Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Prosentase |
|----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 597.756.023.660,00 | 458.360.356.033,78 | 70,89 |
| | a.Pajak Daerah | 352.562.000.000,00 | 269.098.685.361,30 | 76,33 |
| | b.Retribusi Daerah | 76.020.043.060,00 | 56.247.151.698,45 | 73,99 |
| | c.Hasil Perusahaan Daerah | 17.388.750.000,00 | 11.337.924.287,26 | 65,20 |
| | d.Lain-lain PAD yang sah | 151.785.230.600,00 | 121.676.594.686,77 | 80,16 |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | Dana Perimbangan | 1.038.592.985.000,00 | 822.846.649.900,00 | 75,00 |
| II | a. Bagi hasil pajak/bukan pajak | 144.982.243.870,00 | 72.755.509.918,00 | 50,18 |
| | b. Dana Alokasi Umum | 974.570.533.000,00 | 730.927.899.000,00 | 75,00 |
| | c. Dana Alokasi Khusus | 63.877.470.000,00 | 19.163.241.000,00 | 30,00 |
| III | Lain-lain pendapatan yang sah | 2.196.866.492.854,00 | 1.557.316.846.715,78 | 54,82 |
| | a. Pendapatan Hibah | 3.909.700.000,00 | 80.000.000,00 | 2,05 |
| | b. Dana bagi hasil pajak dan propinsi | 167.930.289.324,00 | 136.061.354.264,00 | 81,02 |
| | c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus | 205.607.093.000,00 | 102.803.546.500,00 | 50,00 |
| | d. Bantuan keuangan dari pemerintah lain | 38.233.140.000,00 | 37.164.940.000,00 | 97,21 |

Sumber: Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan Asset kab.Sidoarjo (2012)

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 dianggarkan sebesar 597.756.023.660,00 dan terealisasi sebesar 458.360.356.033,78 atau 70,89%. Sedangkan Dana Perimbangan Sebesar 1.038.592.985.000,00 dan terealisasi sebesar 822.846.649.900 atau 75,00% yang meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk pendapatan lain-lain anggarannya sebesar 2.196.866.492.854,00 dan terealisasi 1.557.316.846.715,78 atau 54,82%. Yang meliputi dana pendapatan hiba, dana bagi hasil pajak dan propinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari pemerintah lain. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah sidoarjo dalam melaksanakan perencanaannya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, sehingga mengalami surplus keuangan. Keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dapat mengetahui peran utama akuntansi sektor publik dalam hal ini peran utamanya adalah sebagai penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

Perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu dari beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan, sedangkan penganggaran merupakan berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Keuangan daerah meliputi pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan pada kinerja keuangan daerah kota Sidoarjo mengalami surplus keuangan sebab dimana pendapatan daerah Sidoarjo pada tahun 2012 sudah terealisasi (Pendapatan Asli Daerah melebihi target yang ditetapkan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipasi*. London: Pondok Edukasi.
- Fatchurrochman. 2002. *Manajemen Keuangan Publik*. Materi Pelatihan Anti Korupsi, *Indonesia Coroption Watch*.
- Glynn, J.J. 1993. *Public Sector Financial Control and Accounting*. 2nd Ed. Oxford: Blackwell.
- Halim. 2004. *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, dan Korupsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Haryanto, Arriffudin, dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Diponegoro university press.

Nawawi, H. 2003. *Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Yogyakarta.

Ichsan M., Ratih, dkk. 1997. *Administrasi Keuangan Daerah dan Pengelolaan dan Penyusunan APBD*. Malang: Brawijaya University Press.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 “Penyelenggaraan Otonomi Daerah”.

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

UU No.25 Tahun 1999.Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

UU No.17 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Keuangan Negara.

UU No,3 Tahun 2004 pasal 5 Tentang Sumber-sumber Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi.

UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.

sidoarjo.kab.go.id (diakses tanggal 21 Mei 2013).